

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama kurun waktu 2005-2010 dapat diketahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:
  - a. RKKD selama kurun waktu 2005-2010 cenderung mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana ekstern masih tinggi. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Blitar adalah 12,32%. Tingkat kemandirian keuangan tertinggi dicapai pada tahun 2005 yaitu sebesar 14,23% dan terendah sebesar 10,23 % terjadi pada tahun 2007.
  - b. Rasio *share* rata-rata adalah 11,01%. Rasio tertinggi adalah 12,67% terjadi pada tahun 2005 dan terendah 8,94% terjadi pada tahun 2007. Namun selama kurun waktu 2005-2010 rasio *share* cenderung mengalami penurunan, sehingga PAD belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap total belanja pemerintah daerah.
  - c. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD berdasarkan target yang telah ditetapkan sudah bisa dikatakan efektif, karena rasio efektivitas PAD selama kurun waktu 2005-2010 cenderung mencapai di atas 100% atau 1 dan hanya rasio pada tahun 2007 yang

mencapai nilai dibawah 100% atau 1. Rata-rata rasio efektivitas PAD adalah 111,27%. Rasio efektivitas PAD tertinggi adalah 126,89% pada tahun 2005, sedangkan rasio terendah adalah 96,36 % terjadi pada tahun 2007.

- d. Rasio efisiensi PAD rata-rata adalah 5,87%. Rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 13,41%, sedangkan rasio terendah 2,67% terjadi tahun 2010. Secara umum upaya pemerintah daerah dalam menggali PAD secara efisien telah berhasil, karena selama kurun waktu tahun 2005-2010 pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 rasio yang dicapai kurang dari 100% atau 1.
- e. Pada tahun 2005-2006 pemerintah daerah Kota Blitar lebih memprioritaskan alokasi belanjanya pada belanja pelayanan publik/belanja modal, sedangkan pada tahun-tahun setelah itu prioritas alokasi belanja pemerintah adalah pada belanja aparatur/belanja operasi. Pergeseran prioritas alokasi belanja ini didasarkan atas kebutuhan dan tujuan pemerintah daerah yang ingin dicapai melalui visi misi yang telah ditetapkan.
- f. Tingkat pertumbuhan PAD rata-rata selama kurun waktu 2005-2010 adalah sebesar 14,68%. Pada tahun 2006, 2008 dan 2010 tingkat pertumbuhannya bernilai positif dengan rasio tertinggi 52,66% pada tahun 2008. Sedangkan pada dua tahun yang lain, yaitu tahun 2007 dan 2009 tingkat pertumbuhan bernilai negatif dengan persentase penurunan -2,29% yang terjadi pada 2009. Secara umum realisasi PAD dari tahun

ke tahun cenderung mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut belum seimbang dengan penambahan belanjanya.

2. Pada peta kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Blitar selama kurun waktu 2005-2010 diketahui bahwa posisi kinerja yang diduduki masih berfluktuasi antara kuadran I dan kuadran IV. Posisi kinerja pada kuadran I terjadi tahun 2006, 2008 dan 2010. Hal ini berarti bahwa pada tahun-tahun tersebut PAD memiliki peran besar dalam total belanja dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya dan daerah mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan PAD-nya. Sedangkan posisi kinerja pada kuadran IV terjadi pada tahun 2007 dan 2009. Pada dua tahun tersebut kontribusi PAD terhadap belanja rendah karena kenaikan belanja tidak di ikuti dengan kenaikan PAD, sehingga pemerintah daerah lebih banyak bergantung pada dana ekstern.

## B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Blitar

Mengingat posisi kinerja pemerintah Kota Bitar pada metode kuadran yang belum stabil dan ketergantungan terhadap bantuan dana ekstern cenderung tinggi, pertumbuhan PAD belum sebanding dengan penambahan belanjanya sehingga kontribusi PAD terhadap belanja belum optimal, maka dalam upaya mewujudkan amanat otonomi daerah dan *good governance* disarankan kepada pemerintah Kota Biitar agar:

- a. Terus berupaya mencari sumber pendapatan yang potensial seperti pembangunan tempat wisata baru, pusat perbelanjaan modern dan lain-lain.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan/jasa yang diberikan, melihat dari segi wilayah tidak memiliki potensi alam yang dapat diandalkan hasilnya secara kontinyu dan sumber PAD terbesar berasal dari retribusi dan pajak.
- c. Melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang lebih baik pada tahun berikutnya.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian yang lebih luas, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Blitar dibandingkan dengan pemerintah daerah lain.